

MADRASAH EDUCATION PATTERNS IN BOARDING SCHOOL (CASE STUDY AT NURUL ISLAM BOARDING SCHOOL ANTIROGO JEMBER)

Sofyan Hadi¹, Bambang Eko Aditia²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: sofyanbadi@uinkhas.ac.id, bambangekoaditia@uinkhas.ac.id

Article Info

Corresponding

Author:

Sofyan Hadi
sofyanbadi@uinkhas.ac.id

Keywords:

Islamic Education Model;
Madrasah Based
Pesantren; Integrated
Curriculum

Kata kunci:

Model Pendidikan Islam;
Pesantren Berbasis
Madrasah;; Kurikulum
Terpadu;

Naskah:

Diterima : 05/03/2026

Direvisi : 10/03/2026

Disetujui : 12/03/2026



Abstract

In the early twentieth century, pesantren developed madrasah education as a response to the colonial Dutch education system. Pesantren adopted formal instructional systems while maintaining their traditional characteristics, particularly the study of classical Islamic texts. This study aims to examine the process of establishment, management practices, curriculum, and student development programs of madrasah education at Pesantren Nurul Islam Jember. This research employs a qualitative method with a phenomenological approach and a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data analysis used the interactive model proposed by Miles and Huberman. The findings indicate that Pesantren Nurul Islam Jember originated from the establishment of the Nurul Islam Jember Islamic Education Foundation in 1985 and later developed into an integrated pesantren with collective leadership based on modern management principles. The curriculum implemented is an integrated curriculum encompassing religious, moral, general, and skills education through a combination of traditional and modern learning methods. Student development programs are carried out synergistically through the roles of the board of trustees, guidance and counseling services, student organizations, and institutional regulations. This study is expected to contribute both academically and practically to the development of pesantren education.

Abstrak

Pada awal abad ke-20, pesantren mengembangkan pendidikan madrasah sebagai respons terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Pesantren mengadopsi sistem pembelajaran formal tanpa meninggalkan tradisi kepesantrenan, khususnya kajian kitab-kitab klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan, manajemen pengelolaan, kurikulum, serta pola pembinaan santri pada pendidikan madrasah di Pesantren Nurul Islam Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Nurul Islam Jember bermula dari berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Nurul Islam Jember pada tahun 1985 dan berkembang menjadi pesantren terpadu dengan manajemen kolektif berbasis prinsip manajemen modern. Kurikulum yang diterapkan merupakan kurikulum terpadu yang mencakup pendidikan agama, moral, umum, dan keterampilan dengan berbagai metode pembelajaran tradisional dan modern. Program pembinaan santri dilaksanakan secara sinergis melalui peran dewan pembina, layanan bimbingan konseling, kepengurusan santri, dan tata tertib pesantren. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan pendidikan pesantren.

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang keberadaannya diperkirakan seiring dengan proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Sejak masa awal Islam dan periode kesultanan-kesultanan Muslim, lembaga pendidikan Islam hadir dalam berbagai bentuk dan sebutan sesuai dengan konteks sosial dan geografisnya, seperti *rangkang* dan *meunasab* di Aceh, *surau* di Minangkabau, *pondok* di Kalimantan dan Riau, serta *pesantren* di Jawa (Azra, 1997). Keragaman nomenklatur tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam tumbuh secara organik dari masyarakat lokal dan berfungsi sebagai pendidikan pribumi yang berakar kuat pada tradisi sosial-budaya setempat.

Sejumlah penelitian jurnal terakreditasi menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat transmisi keilmuan Islam, tetapi juga sebagai institusi pembentukan moral, budaya, dan identitas keislaman masyarakat Indonesia (Van Bruinessen, 1990) Pesantren berkembang secara mandiri melalui relasi kyai, santri, dan masyarakat, sehingga membentuk sistem pendidikan berbasis komunitas yang relatif otonom dari kekuasaan negara (Sanaky & SI, 2017). Dalam perspektif historis, pesantren juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan resistensi kultural, khususnya pada masa kolonial, ketika pendidikan Barat mulai diperkenalkan secara sistematis (Masykur, 2018).

Dengan karakteristik tersebut, pesantren dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisi keilmuannya. Keberlanjutan pesantren hingga saat ini menegaskan perannya sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan Islam nasional sekaligus sebagai bentuk pendidikan pribumi yang terus mengalami transformasi.

Pada awalnya, pesantren merupakan institusi pendidikan paling sederhana yaitu berupa pengajaran membaca al-Qur'an yang dilanjutkan dengan pengajaran sholat, wudlu secara praktis serta beberapa do'a. Ada juga yang mengajarkan ilmu tajwid sebagai landasan untuk menfasihkan dalam membaca al-Qur'an (Steenbrink, 1986). Sedangkan pengajian kitab hanya diikuti oleh santri-santri yang sudah memiliki kualifikasi tertentu. Pengajian kitab ini menggunakan dua metode yakni sorogan dan weton/bandongan. (Dhofier, 1982) Materi kajiannya hanya meliputi ilmu agama Islam, seperti nahwu, shorof, fiqh, aqidah, serta akhlaq/tasawuf.

Selanjutnya Pesantren, pada awal abad ke-20 mencoba mengembangkan diri dengan mengikuti tuntutan masyarakat yakni dengan banyak munculnya "anak pesantren" yang berupa lembaga pendidikan madrasah. (Djamil, 1999) Lembaga ini tumbuh menjamur pada dekade

pertama dan kedua dalam rangka merespons sistem klasikal yang dilancarkan Pemerintah Belanda sebelumnya.

Kemunculan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam modern mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, terutama sebagai upaya peningkatan mutu dan integrasi sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1946, upaya pertama dilakukan dengan memasukkan tujuh mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah untuk memperkuat kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional pascakolonial. Upaya ini kemudian dilanjutkan pada tahun ajaran 1958/1959 melalui program *Madrasah Wajib Belajar* (MWB), yang memberi pengakuan formal terhadap madrasah yang memenuhi standar pembelajaran wajib, sebagai bentuk modernisasi dan standarisasi pembelajaran Islam (Malfi & Samad, 2023). Kebijakan ini menunjukkan langkah awal pemerintah dalam mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan umum dalam kerangka nasional.

Selanjutnya, pemerintah memperluas bentuk intervensinya pada tahun 1967 dengan membuka kesempatan penerangan madrasah, meskipun kemudian dikendalikan melalui kebijakan larangan penerangan dalam Keputusan Menteri Agama No. 213 Tahun 1970 yang mencerminkan dinamika politik pendidikan pada masa Orde Lama hingga Orde Baru (Malfi & Samad, 2023). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk menyeimbangkan tuntutan pendidikan religius dan kebutuhan modernisasi, sehingga madrasah tidak hanya menjadi lembaga keagamaan tetapi juga bagian dari sistem pendidikan nasional yang lebih luas.

Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa dinamika kebijakan pendidikan madrasah masih terus berlanjut hingga era modern, dengan tuntutan integrasi kurikulum yang memperhatikan nilai-nilai agama sekaligus kebutuhan kompetensi umum siswa dalam konteks global (Siregar et al., 2025). Ini mencerminkan kontinuitas sejarah kebijakan pendidikan madrasah yang sejak awal berupaya menjembatani antara tradisi pesantren dan tuntutan pendidikan nasional modern.

Pada masa selanjutnya, pemerintah melalui Departemen Agama nampaknya menginginkan adanya langkah-langkah menuju pengintegrasian antara pendidikan agama yang berkembang di masyarakat namun belum mendapatkan perhatian secara proporsional, dengan pendidikan umum yang sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda. Tonggak sejarah integrasi tersebut (integrasi Pendidikan Nasional) sebenarnya dimulai dengan kemunculan SKB tiga Menteri (Menteri Agama, P & K dan Dalam Negeri) tertanggal 24 Maret 1975.

Dalam konteks ini, sejumlah diktum yang dianggap sebagai langkah strategis menuju tahapan integrasi pendidikan misalnya dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 dinyatakan :

Yang dimaksud dengan madrasah dalam Keputusan Bersama ini ialah : Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % disamping mata pelajaran umum.

Madrasah itu meliputi tiga tingkatan : a. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar, b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, c. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Selanjutnya dalam Bab II pasal 2 disebutkan bahwa : Maksud dan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah ialah agar Tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di Sekolah Umum yang setingkat, sehingga : a. Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum yang setingkat. b. Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas. c. Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat.

Mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam Bab IV pasal 4 sebagai berikut: a. Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, b. Pembinaan mata pelajaran Agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, c. Pembinaan dan pengawasan mutu Mata Pelajaran Umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.(Saleh, 1984).

Kebijakan ini kembali mengundang problem bagi pengelola madrasah swasta terutama yang terlahir dari pesantren. Mereka menganggap ada upaya-upaya memarginalkan ilmu-ilmu keislaman yang sebenarnya merupakan pokok kajian yang harus dimiliki oleh para peserta didik. Tawaran struktur kurikulum tersebut tidak mungkin menciptakan kader-kader ulama.

Untuk menjembatani problem tersebut, pemerintah kembali menawarkan sebuah kebijakan yakni menyusun sebuah program dengan struktur materi 70 % agama dan 30 % umum. Program ini sebenarnya sudah dituangkan kurikulum 1984 dengan sebutan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), namun pelaksanaannya baru pada tahun 1987 dengan membuat uji coba di lima MA, yakni MAN Darussalam Ciamis Jawa Barat, MAN 1 Yogyakarta, MAN Ujung Pandang Sulawesi Selatan, MAN Koto Baru Padang Panjang Sumatera Barat dan MAN Jember Jawa Timur. Dari tahun ke tahun perkembangan MAPK berjalan pesat sehingga sampai dengan tahun 1993 MAPK Negeri berjumlah 16 buah dan MAPK Swasta berjumlah 105 (Depag, 1998).

Dalam rangka penyesuaian dengan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Program MAPK ini dimodifikasi menjadi MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) berdasarkan KMA No.37 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Keagamaan dan KMA No.374 tahun 1993 tentang kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan. Keputusan Menag ini kemudian

dijabarkan dengan edaran Dirjen Binbaga Islam No. E.W/PP.00/A2/445/94 tentang penataan Madrasah. Sehingga semua MAPK Negeri dan Swasta berubah menjadi MAK (Taufiq et al., 2020).

Dalam upaya pengembangan MAK tersebut, maka Dirjen Binbaga Islam menerbitkan edaran No. E/PP/.00.6/J/54/97 tentang penyelenggaraan MAK yang isinya antara lain : “Program Keagamaan dapat dibuka pada setiap Madrasah yang mampu melaksanakan tuntutan kurikulum MAK sebagaimana diatur dalam SK Menag No. 374/1993 dan izin operasionalnya diberikan oleh Kanwil Depag setempat.” Sejak dikeluarkannya edaran Dirjen tersebut banyak MAK baru. Sampai dengan tahun 1999 jumlah MAK Negeri 28 dan MAK Swasta 142, sehingga jumlah seluruhnya 170 (Depag, 1998).

Dasar diatas diperkuat dengan munculnya Teori manajemen pendidikan madrasah pada dasarnya merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga pendidikan Islam. Manajemen madrasah mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga integrasi nilai-nilai keislaman dalam kepemimpinan, pengelolaan kurikulum, serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan madrasah. Manajemen yang efektif memungkinkan madrasah meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan karakter religius, serta daya saing lembaga pendidikan Islam di tengah perubahan sistem pendidikan modern (Saugi et al., 2025).

Dalam perkembangan penelitian mutakhir, teori manajemen pendidikan madrasah juga menekankan pendekatan manajemen berbasis mutu dan kepemimpinan transformasional. Pendekatan ini memandang kepala madrasah sebagai pemimpin strategis yang berperan dalam mengintegrasikan nilai, inovasi kurikulum, serta pengelolaan organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Implementasi manajemen berbasis madrasah yang terstruktur melalui perencanaan strategis, pelaksanaan program pendidikan, dan evaluasi berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kualitas akademik, efektivitas organisasi, serta profesionalisme tenaga pendidik di lembaga madrasah (Scholte, 1996).

Manajemen pendidikan madrasah tersebut adalah bahwa pengelolaan madrasah harus dilakukan melalui proses manajemen yang sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber daya pendidikan. Proses manajerial tersebut bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien, sekaligus menjaga integrasi antara pengelolaan kelembagaan dengan nilai-nilai

keislaman yang menjadi karakteristik utama madrasah. Dengan manajemen yang terstruktur, madrasah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, pembinaan karakter religius, serta kinerja organisasi pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, perkembangan teori manajemen pendidikan madrasah dalam penelitian mutakhir menekankan pentingnya penerapan manajemen berbasis mutu dan kepemimpinan transformasional oleh kepala madrasah. Kepemimpinan yang strategis dan inovatif memungkinkan madrasah beradaptasi dengan perubahan pendidikan modern, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan profesionalisme guru, dan penerapan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan madrasah tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam mengintegrasikan nilai, mutu pendidikan, dan inovasi organisasi secara berkelanjutan.

Jika kita amati kebijakan yang terakhir ini merupakan jalan tengah atas keberatan pihak madrasah pesantren yang ingin tetap mempertahankan tradisi keilmuan safaliyah. Namun jika kita menegok ke belakang, maka kebijakan ini memiliki kemiripan dengan kebijakan pemerintah pada tahun 1946. Pada saat itu pemerintah mewajibkan memasukkan 7 mata pelajaran umum ke dalam madrasah pesantren. Dengan kebijakan, maka struktur kurikulum madrasah terdiri dari 70 % pelajaran agama dan 30 % pelajaran umum. Sehingga produk kurikulum MAPK *ekuivalen* dengan produk kebijakan pemerintah tahun 1946. Sehingga program ini sangat diminati oleh Penyelenggara Madrasah Aliyah, terutama Madrasah Aliyah Pesantren.

Disamping itu, tingginya animo tersebut, disebabkan oleh dua hal utama yang menjadi karakter Madrasah Aliyah Keagamaan, yakni diajarkannya materi keagamaan berdasarkan kitab-kitab berbahasa Arab dan dikelola dalam sistem asrama (Depag, 1998). Dua hal inilah yang kemudian mengingatkan kembali kita pada pendidikan pesantren.

Kebijakan terbaru yang tidak lagi memberikan posisi jelas bagi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), bahkan mengganti istilah MAK menjadi Madrasah Aliyah Kejuruan, secara substantif melanjutkan arus kebijakan yang sejak SKB Tiga Menteri mengutamakan penyetaraan madrasah dengan sekolah umum dan mengurangi fungsi pencetak ulama. Kebijakan Orde Baru sendiri sampai harus melahirkan Program Khusus MAPK/MAK sebagai koreksi atas melemahnya peran madrasah sebagai produsen ulama dan pemimpin agama (Huda, 2022).

Sejumlah kajian historis menunjukkan bahwa MAPK/MAK dibuka untuk mengatasi “krisis ulama”, dengan seleksi ketat, pola asrama, penguatan kitab berbahasa Arab, dan orientasi kuat pada studi lanjutan di IAIN/UIN dan universitas Islam, sehingga ia menjadi inovasi penting dalam sistem pendidikan Islam nasional (Latief et al., 2021). Hilangnya kejelasan posisi MAK

keagamaan dalam regulasi sekarang wajar dipandang sebagai bentuk penghapusan tidak langsung terhadap satu jalur penting pendalaman ilmu agama. Penelitian kebijakan pendidikan Islam menegaskan bahwa jenjang RA–MI–MTs–MA/MAK adalah satu kesatuan berjenjang; perubahan orientasi di tingkat MA/MAK akan berdampak ke arah, desain kurikulum, dan praktik pembelajaran di MI sebagai fondasi awal (Khozin & Taufik, 2021). MI kini juga menghadapi tantangan baru seperti Kurikulum Merdeka, pendidikan inklusif, dan tuntutan penguatan karakter, sementara dukungan kebijakan dan sumber daya sering kali terbatas (Fatimah et al., 2023).

Berbagai model respon muncul, diantaranya adalah ada pengelola Madrasah Ibtidaiyah yang mengembangkan sistem asrama bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah Keagamaan menjadi Pesantren yang mandiri namun masih masuk bagian yang tak terpisahkan dalam madrasah. Diantara pengelola madrasah tersebut adalah Madrasah Unggulan Nuris Jember

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas sosial dari perspektif para partisipan. Pendekatan kualitatif menekankan pada upaya memahami makna, pengalaman, serta interpretasi individu terhadap fenomena sosial yang mereka alami dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan partisipan untuk menggali informasi secara mendalam melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada pengukuran variabel, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses, makna, serta konteks sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena (Creswell & Poth, 2016)

Lebih lanjut, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan kontekstual. Peneliti berusaha menangkap realitas sebagaimana dipahami oleh para partisipan, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi sosial secara lebih komprehensif. Dalam pendekatan ini, pemahaman terhadap fenomena tidak ditentukan sejak awal secara kaku, melainkan berkembang secara bertahap melalui proses pengumpulan dan analisis data yang berlangsung secara simultan. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan menafsirkan pola, tema, serta kategori yang muncul dari data empiris di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan mendalam mengenai dinamika sosial yang menjadi fokus penelitian (Yin, 2015).

Selain itu, penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif partisipan yang beragam dalam memahami suatu fenomena sosial. Melalui interaksi yang intensif antara peneliti dan partisipan, penelitian kualitatif mampu mengungkap makna-makna yang tersembunyi di balik tindakan, pengalaman, dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena pendidikan dan sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks, nilai, dan pengalaman para pelaku di dalamnya. Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menghasilkan interpretasi yang kaya dan reflektif terhadap realitas sosial yang diteliti (Flick, 2022)

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa realitas masyarakat pesantren bukan hanya sekedar yang nampak dipermukaan saja, (Berger & Kellner, 1985) tetapi lebih dari itu, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan integral tentang pesantren dituntut penggalian yang mendalam atas makna dibalik interaksi antar sesama manusia serta fenomena-fenomena dan simbol-simbol yang digunakan masyarakat pesantren. Dengan demikian peneliti diharapkan dapat membongkar tabir rahasia nilai-nilai kehidupan pesantren. Dalam posisi inilah pendekatan fenomenologi memiliki arti pentingnya.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini mempunyai tujuan pokok untuk menerangkan apa adanya atau apa yang ada sekarang. (Moleong & Surjaman, 2014) Sifat analitis bukan berarti peneliti ingin memunculkan teori-teori baru tentang pesantren, tetapi digunakan untuk mengembangkan lebih jauh fenomena empiris hasil penelitian.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yakni sebuah studi mendalam tentang satu entitas dan berjangka waktu relatif lama dengan jumlah populasi kecil. (Muhadjir, 1996) Dalam hal ini sudah barang tentu generalisasi dari studi kasus ini terbatas hanya pada kasus lain yang memiliki karakteristik dan corak yang sama.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data meliputi informan (*actor*), kegiatan (*activity*) dan tempat kegiatan (*place*) yang akan memberikan data lebih lengkap, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian tercapai.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka yang dijadikan sampel sumber data dan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan data tentang manajemen pengelolaan, program kurikulum dan program pembinaan santri sumber datanya adalah pengasuh pesantren, ustadz dan dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan dokumen. Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh data tertulis maupun visual yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dokumentasi dapat berupa berbagai sumber seperti arsip resmi, laporan kegiatan, catatan institusi, foto, rekaman, maupun dokumen administratif yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh informasi yang bersifat historis, kontekstual, serta faktual mengenai aktivitas atau kebijakan yang terjadi dalam suatu lembaga atau lingkungan sosial tertentu. Data dokumentasi juga berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui teknik lain seperti wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2016).
- b. Untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pendidikan yang ada di lingkungan pesantren, baik yang klasikal maupun non klasikal serta kegiatan pendidikan lainnya yang menjadi fokus penelitian, sumber datanya adalah Pengasuh, ustadz, siswa dan lokasi penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi. Observasi ini digunakan untuk melihat lebih dekat munculnya fenomena dilapangan. Di dalam observasi ini peneliti berperan sebagai partisipan observasi.

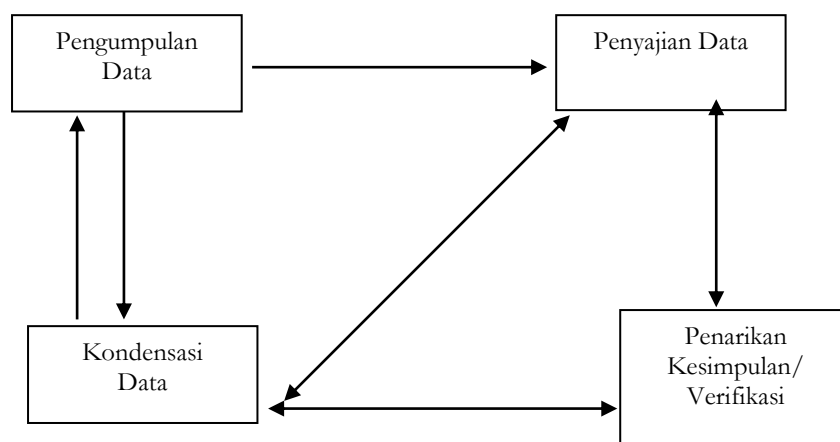
Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh, yang berujung pada kesimpulan atau verifikasi, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka mutlak dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono ada empat kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu; (1) derajat kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergantungan (*dependability*), dan (4) kepastian (*confirmability*). (Sugiyono, 2006:366) Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan kredibilitas data dalam penelitian ini, meliputi: Perpanjangan pengamatan, Ketekunan pengamatan, Triangulasi, Analisis Kasus, Penggunaan Bahan Referensi, Member Check (Sugiyono, 2013).

Teknik Analisis Data

Untuk memberikan pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemu dan kumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi

bersifat deskripsi. Sebagaimana dikatakan (Arikunto, 1987) penelitian yang menjawab problematika serta ingin mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, lebih tepat digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Langkah yang ditempuh pertama kali dalam analisis ini adalah mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel atau buku-buku pedoman dan sebagainya (Moleong & Surjaman, 2014). Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif sebagai mana dikemukakan oleh (Miles & Huberman, 1994). Proses ini dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses; pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data.



Gambar 1. Komponen Analisis Data (Model Interaktif)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Manajemen Pengelolaan Pondok Pesantren

Kelahiran Pondok Pesantren Nurul Islam pada tahun 2011 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari program madrasah sebelumnya yaitu Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, adalah ide yang sangat antisipatif terutama dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru lahir satu tahun kemudian. Sebagaimana diketahui bahwa pada Bagian Ketiga Pendidikan Menengah Pasal 18 ayat (3) undang-undang tersebut tidak memberikan posisi yang jelas terhadap Madrasah Aliyah Keagamaan. Bahkan istilah MAK dipakai untuk singkatan dari Madrasah Aliyah Kejuruan. Secara tidak langsung telah terjadi penghapusan program Madrasah Aliyah Keagamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelahiran Pondok Pesantren Nurul Islam Jember merupakan pionir bagi kemunculan Pondok pesantren yang dilahirkan oleh madrasah.

Sistem manajemen pengelolaan Pondok Pesantren Nurul Islam Jember merupakan organisasi impersonal dengan menerapkan kepemimpinan kolektif dan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern. Hal ini terlihat dengan adanya pembagian fungsi dan kewenang yang

jelas, baik pada struktur organisasi dewan pembina maupun struktur organisasi santri. Sehingga dapat dikatakan bahwa pesantren ini masuk dalam kategori tipe pesantren terpadu sebagaimana kategori tipe-tipe pesantren yang dilakukan dalam penelitian Ronald Alan Lukens Bull.

Dalam konteks manajemen pesantren, pengaturan tugas dan fungsi di tingkat dewan pembina dan kepengurusan santri menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai wahana pendidikan karakter yang memfasilitasi kemandirian santri. Di tingkat dewan pembina, fungsi manajerial lebih ditekankan pada kebijakan umum dan perumusan substansi pendidikan serta pembinaan kehidupan santri, yang mencakup perencanaan strategis dan penetapan arah organisasi (Zakaria & Yusmaliana, 2022).

Pada sistem Manajemen madrasah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, danmempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBM juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepadamadrasahuntuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi siswa. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkankerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan(Hafid, 2016). Sedangkan pada tingkat kepengurusan santri, penekanan manajemen diarahkan pada pemberdayaan dan pembentukan kemandirian santri melalui pengalaman praktis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas keseharian yang bersifat teknis dan praktis. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pemberdayaan santri melalui program kewirausahaan dan kegiatan produktif terbukti meningkatkan kemampuan kemandirian, keterampilan, dan sikap tanggung jawab mereka (Mawaddah, 2025). Penelitian lain juga menegaskan bahwa struktur manajemen yang memfasilitasi tanggung jawab santri dalam organisasi internal pesantren, termasuk unit-unit bisnis dan pengelolaan kegiatan, secara signifikan memperkuat rasa percaya diri serta kemampuan pengambilan keputusan santri, yang pada gilirannya mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan masyarakat secara mandiri (Nangimah, 2024).

Dengan demikian, manajemen pesantren yang membedakan peran strategis pengurus dan pengelolaan operasional santri tidak hanya menciptakan tata kelola yang efektif, tetapi juga menjadikan pengalaman kepengurusan santri sebagai bagian integral dari pendidikan karakter dan kemandirian mereka di masa depan.

Program Kurikulum

Mengamati Program Kurikulum Pondok Pesantren Nurul Islam Jember yang dikategorisasikan ke dalam struktur kurikulum MAK, struktur kurikulum Muatan Lokal MAK,

struktur kurikulum Pondok Pesantren dan Kegiatan Ekstra Kurikuler menunjukkan bahwa pesantren tersebut menggunakan kurikulum terpadu dengan melaksanakan empat jenis aktifitas pendidikan dan pengajaran, yakni : pendidikan ilmu agama, pendidikan moral, pendidikan umum, serta pendidikan ketrampilan.

Pendidikan ilmu agama dilaksanakan disamping menggunakan metode sorogan dan bandongan/weton, juga digunakan sistem klasikal/madrasi yang diintegrasikan ke dalam program madrasah. Pendidikan moral dilaksanakan dengan belajar dengan melakukan (*learning by doing*) dengan berlandaskan pada mau'izhoh dan uswatun hasanah dari para pengasuh, guru, pembimbing dan para pengurus. Pendidikan umum hanya dilaksanakan di program madrasah saja, karena hal ini menjadi tuntutan formal dari Departemen Agama yang telah menetapkan standar kurikulum MAK. Pendidikan Ketrampilan dilaksanakan oleh pesantren untuk memberikan bekal kepada para santri hidup di tengah-tengah masyarakat. Keterampilan ini meliputi keterampilan personal, keterampilan sosial dan *life skill*.

Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unggulan di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Jember dirancang dengan model integrasi antara kurikulum nasional madrasah dan kurikulum pesantren. Model kurikulum ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik umum, tetapi juga memiliki dasar keagamaan yang kuat sejak jenjang pendidikan dasar. MI Unggulan Nuris didirikan pada tahun 2010 sebagai lembaga pendidikan dasar berbasis pesantren dengan sistem full day school, di bawah naungan yayasan pesantren Nuris Jember. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh keinginan pengasuh pesantren untuk menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini sekaligus memberikan pendidikan formal yang berkualitas kepada para santri dan masyarakat sekitar (Prayogo & Widodo, 2019).

Secara struktural, kurikulum MI di pesantren Nuris menggabungkan kurikulum Kementerian Agama (Kemenag) dengan kurikulum khas pesantren. Kurikulum Kemenag mencakup mata pelajaran umum seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Pendidikan Pancasila, serta mata pelajaran keagamaan seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Sementara itu, kurikulum pesantren menambahkan penguatan pendidikan keislaman melalui program-program seperti pembelajaran kitab dasar, penguatan baca tulis Al-Qur'an, serta pembinaan karakter keagamaan santri. Integrasi kedua kurikulum tersebut dirancang agar siswa memiliki keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan umum dan pemahaman agama Islam secara mendalam (Mubarokah, 2020).

Selain mata pelajaran formal, MI Nuris juga mengembangkan program unggulan berbasis pesantren, seperti program tahfidz Al-Qur'an, penguatan akidah melalui hafalan kitab dasar

seperti *Aqidatul Awam*, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan minat dan bakat siswa. Program-program tersebut bertujuan untuk membentuk peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan sekaligus memiliki akhlakul karimah dan karakter keislaman yang kuat. Melalui model kurikulum integratif ini, MI Nuris berupaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga memiliki landasan religius yang kokoh sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan pengamatan terhadap program kurikulum di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris) Jember, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini menerapkan kurikulum terpadu yang mengintegrasikan kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren dalam satu sistem pendidikan. Struktur kurikulum tersebut mencakup kurikulum MAK, muatan lokal, kurikulum kepesantrenan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kompetensi santri secara menyeluruh. Implementasi kurikulum tersebut diwujudkan melalui empat bentuk aktivitas pendidikan, yaitu pendidikan ilmu agama, pendidikan moral, pendidikan umum, dan pendidikan keterampilan. Pendidikan agama dilaksanakan melalui metode tradisional pesantren seperti *sorogan* dan *bandongan/weton* yang dipadukan dengan sistem klasikal madrasah, sementara pendidikan moral ditanamkan melalui praktik kehidupan sehari-hari dengan pendekatan *learning by doing* serta keteladanan (*uswatun hasanah*) dari para pengasuh dan guru. Pendidikan umum diselenggarakan melalui program madrasah sesuai dengan standar kurikulum Kementerian Agama, sedangkan pendidikan keterampilan diberikan untuk membekali santri dengan kemampuan personal, sosial, dan *life skills* yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) Unggulan, integrasi kurikulum ini diwujudkan melalui perpaduan antara mata pelajaran umum dan keagamaan dengan program khas pesantren seperti pembelajaran kitab dasar, penguatan baca tulis Al-Qur'an, program tahfidz, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk peserta didik yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter religius yang kuat.

Program Pembinaan Santri

1. Pembinaan Oleh Dewan Pembina

Pembinaan oleh dewan pembina dilaksanakan dengan menggunakan kolaborasi dua pendekatan yakni mau'idhoh hasanah dan uswatun hasanah yang dilakukan secara simultan. Pendekatan ini diimplementasikan melalui forum formal, non formal maupun informal. Forum formal seperti pada saat pengajian, jama'ah sholat lima waktu, istighotsah, kegiatan ekstra kurikuler dan lain-lain. Forum nonformal, seperti pada saat kerja bhakti, olah raga, dan lain-lain. Forum informal seperti pada saat istirahat, makan, kunjungan ke rumah santri, dan lain-lain. (wawancara Shohibul Huda AH)

2. Pembinaan Melalui Bimbingan dan Konseling

Pembinaan santri melalui Bimbingan dan Konseling dilaksanakan oleh tim Bimbingan dan Konseling yang terdiri dari Dra. Hj. Noor Jannah, Dra. Chofiyanda, Luluk Chumaidah, S.Pd dan Mu'ayyanah, S.Pd. Program Bimbingan dan Konseling tersebut meliputi :

- a. Pengembangan kehidupan pribadi
- b. Pengembangan kehidupan sosial
- c. Pengembangan kegiatan belajar
- d. Pengembangan perencanaan karier
- e. Pengembangan kehidupan berkeluarga
- f. Pengembangan kehidupan keberagamaan

Disamping melaksanakan program-program tersebut, tim bimbingan dan konseling juga melaksanakan beberapa layanan seperti :

- a. Layanan Orientasi.
- b. Layanan informasi
- c. Layanan penempatan dan penyaluran
- d. Layanan konseling perorangan
- e. Layanan bimbingan kelompok
- f. Layanan konseling kelompok
- g. Layanan konsultasi
- h. Layanan mediasi (administrasi Bimbingan dan Konseling)

3. Pembinaan Melalui Kepengurusan Santri

Pembinaan melalui kepengurusan santri merupakan salah satu bentuk pembinaan teman sebaya. Melalui bentuk pembinaan ini diantara santri akan terjadi saling mengingatkan jika ada santri yang belum melakukan suatu kewajiban atau ada santri yang melakukan perbuatan yang dilarang. Proses saling mengingatkan tersebut sangat efektif dalam menyelesaikan masalah maupun dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku para santri. bahkan penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan oleh para santri sendiri. (wawancara : Ulfiya Nur Faiqoh)

4. Pembinaan Melalui Tata Tertib

Pembinaan melalui tata tertib ini meliputi beberapa bidang, yaitu : kewajiban, larangan, anjuran, kunjungan orang tua / penjemputan santri, bahasa, kebersihan dan perlengkapan, MCK, konsumsidan kesehatan.

Secara umum santri memiliki kewajiban melaksanakan akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jama'ah, melaksanakan 8K (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, kerindangan dan kepustakaan), melaksanakan 3 D (disiplin ibadah, disiplin waktu, disiplin belajar) dan menutup aurot sesuai dengan aturan syar'i. Disamping itu santri juga memiliki kewajiban mengikuti seluruh kegiatan pondok sebagaimana tertera dalam jadwal kegiatan harian santri pondok pesantren Nurul Islam Jember.

Pembinaan santri Pondok Pesantren Nurul Islam Jember yang meliputi pembinaan oleh Dewan Pembina, melalui Layanan Bimbingan dan Konseling, Kepengurusan Santri dan melalui pembuatan tata tertib merupakan pola pembinaan sinergi yang memberdayakan semua unsur untuk dapat berperan dalam pengembangan potensi diri santri. Pola ini menunjukkan adanya penggeseran terhadap teori *patron-client*. Dimana sang kyai dianggap sebagai *patron*, tempat bergantung para santri, sedangkan santri berkedudukan sebagai *client* bagi kyai. (Sukamto, 1999).

Pola ini juga menggeser teori *power and authority* yang menyatakan bahwa kyai merupakan merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Tak seorang pun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kyai (dalam lingkungan pesantrennya) kecuali kyai lain yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar. Para santri selalu mengaharap dan berfikir bahwa kyai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri (*self-confidence*), baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren (Dhofier, 1982).

SIMPULAN

Kelahiran Pondok Pesantren Nurul Islam Jember pada tahun 2011 merupakan langkah strategis dan antisipatif dalam merespons dinamika kebijakan pendidikan nasional, khususnya hilangnya posisi Madrasah Aliyah Keagamaan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Pesantren ini dapat dipandang sebagai pionir pesantren yang lahir dari pengembangan madrasah, sekaligus upaya mempertahankan pendidikan keagamaan berbasis pesantren. Pesantren Nurul Islam Jember dikelola dengan sistem manajemen modern yang bersifat impersonal dan kolektif, ditandai dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara dewan pembina dan kepengurusan santri. Pola ini menempatkan pesantren sebagai pesantren terpadu yang tidak hanya menekankan kepemimpinan kyai, tetapi juga pemberdayaan kelembagaan dan santri. Kurikulum yang diterapkan bersifat terpadu, mencakup pendidikan

agama, moral, umum, dan keterampilan dengan memadukan metode tradisional dan modern. Sementara itu, pembinaan santri dilakukan secara sinergis melalui peran dewan pembina, layanan bimbingan dan konseling, kepengurusan santri, serta tata tertib pesantren. Pola pembinaan ini menunjukkan pergeseran dari relasi patron-klien menuju pola partisipatif dan kolaboratif yang mendorong kemandirian serta pengembangan potensi santri secara menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (1987). *Metode Penelitian Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. (1997). Konstruksi Agama Memasuki Milenium Ketiga. *Jurnal PERTA*, 1(1).
- Berger, P. L., & Kellner, H. (1985). *Sosiologi ditafsirkan kembali: esei tentang metode dan bidang kerja*. Lembaga Penelitian Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, Jakarta.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Depag, R. I. (1998). Kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1994: Landasan Program dan Pengembangan. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam.
- Dhofier, Z. (1982). Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai. (*No Title*).
- Djamil, A. (1999). Pesantren dan Kebudayaan, Kajian Ulang Tentang Peran Pesantren Sebagai Pembentuk Kebudayaan Indonesia. Semarang: LAIN Walisongo.
- Fatimah, E. S., Sahal, Y. F. D., Khusni, K., & Erihadiana, M. (2023). Curriculum Management and Implementation Management at Madrasah Ibtidaiyah (Islamic Elementary School) Al Mukhlisin, Bandung. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 6(2), 801–812.
- Flick, U. (2022). *An introduction to qualitative research*.
- Hafid, M. (2016). Pola Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBM). *Al-Ashr: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 1(1), 169–182.
- Huda, M. (2022). *Kebijakan Pendidikan Islam di Masa Orde Baru dalam Mengatasi Krisis Ulama: Kajian Historis Labirnya MAPK*. *Kuttab*, 6 (2), 234.
- Khozin, W., & Taufik, O. A. (2021). Gaps Identification Of Inclusive Education: Evaluative Study At Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sidomulyo, Kebumen. *Edukasi*, 19(1), 40–50.
- Latief, S., Sari, Y. A., Yusuf, M., Armila, A., & Hidayat, R. E. (2021). The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 4(2), 86–99.
- Malfi, F., & Samad, D. (2023). Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan*, 3(1), 24–30.

- Masykur, M. R. (2018). Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 3(2), 31–45.
- Mawaddah, N. A. (2025). Manajemen pesantren untuk membangun kemandirian santri berbasis kewirausahaan. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 5(2), 392–404.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Mubarokah, C. A. (2020). *Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Science Club (IPA) di Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Nuris Jember. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah LAIN Jember*. Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Nangimah, M. (2024). Model Manajemen Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Kemandirian Santri Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lampung Selatan. *UNISAN JURNAL*, 3(10), 57–66.
- Prayogo, S. A., & Widodo, A. (2019). Membangun Budaya Mutu di Madrasah Unggul (Studi Kasus di MAN 1 Jember dan MA Unggulan Nurul Islam Jember). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1–29.
- Saleh, A. (1984). Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan. *Jakarta: Dharma Bakti*.
- Sanaky, H. A. H., & SI, M. (2017). *Studi Pemikiran Imam Zarkasyi Tentang Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia*.
- Saugi, W., Komariyah, L., Subagiyo, L., Warman, W., & Mansouri, M. C. (2025). Madrasah Management Transformation: Systematic-Bibliometric Review Of Indonesia's Religious Ministry Policy 2019–2024. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 26(2), 202–226.
- Scholte, J. A. (1996). The geography of collective identities in a globalizing world. *Review of International Political Economy*, 3(4), 565–607.
- Siregar, A. K., Faridi, F., & Tobroni, T. (2025). Government Policy on Islamic Religious Education in Madrasahs. *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, 4(2), 493–498.
- Steenbrink, K. A. (1986). Pesantren, madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam kurun moderen. (No Title).
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sukanto. (1999). *Kepemimpinan kiai dalam pesantren*. Lp3es.
- Taufiq, I., Adnan, A., Efendi, E., Junaidi, M. H., Makin, A., Abas, Z., Hariyadi, M., Abidin, A. Z., Muhaimin, M., & Mulyadi, A. (2020). *Santri Kalivates: Dari MAPK untuk Indonesia*. Haja.

Van Bruinessen, M. (1990). Kitab kuning: Books in Arabic script used in the pesantren milieu: Comments on a new collection in the KITLV library. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 2/3de Afl, 226–269.

Yin, R. K. (2015). *Qualitative research from start to finish*. Guilford publications.